

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan mengkaji tentang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap aksi terorisme ISIS. *Islamic State of Iraq and Suriah* atau yang dikenal sebagai ISIS sebelumnya merupakan metamorfosis dari jaringan teroris *Islamic State of Iraq* (ISI) yang terbentuk pada tahun 2006. Sedangkan *Islamic State of Iraq* (ISI) merupakan metamorfosis dari *Al-Qaeda Iraq* (AQI) yang terbentuk pada tahun 2004. Sedangkan AQI sendiri merupakan organisasi sayap dari jaringan terorisme Al-Qaeda internasional pimpinan Osama bin Laden. Pergantian nama kelompok radikal ini terjadi seiring dengan pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2013, Abu Umar Al-Baghdadi pemimpin tertinggi *Islamic State of Iraq* (ISI) meninggal dunia dan digantikan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi yang kemudian merekrut para milisi *Al-Qaeda Suriah* (AQS) untuk bergabung bersama mereka hingga kelompok ini resmi mendeklarasikan dirinya pada 9 April 2013.¹

Pada awalnya, kelompok gabungan ini mencetuskan diri dengan nama *Islamic State in Iraq and the Levant* atau ISIL. Namun secara internasional kelompok ini lebih dikenal dengan nama *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) atau yang pada perkembangannya berubah nama menjadi *Islamic State* (IS) atau *Daulah Islamiah* (DI). Nama tersebut dirasa sesuai dengan tujuan utama mereka

¹ Andrea Plebani, *New (and old) patterns of jihadism: Al-Qaida, the Islamic State and Beyond*. Instituto per gli Studi di Politica Internazionale – Milan. Italia. 2014, Hal 8

yaitu menegakan khilafah sebagai satu-satunya pemerintahan yang berdaulat diatas muka bumi.

Dibawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, ISIS telah menjelma menjadi organisasi teroris paling berbahaya sekaligus kontroversial didunia karena tidak hanya melakukan aksi terror kepada musuh-musuh mereka diluar Islam, tetapi juga menuai konflik dengan organisasi radikal Islam lainnya seperti Jabhah al-Nusra dan jaringan Al-Qaeda Internasional. Konflik dengan Jabhah al-Nusra dimulai ketika Abu Bakar al-Baghdadi pada 9 April 2013 melalui sebuah rekaman suara mengklaim bahwa pasukan Jabhah al-Nushra adalah bagian dari ISIS, namun pernyataan itu segera dibantah oleh Abu Muhammad Al-Jawlani pemimpin tertinggi Jabhah al-Nushra juga melalui sebuah rekaman suara bahwa Jabhah al-Nusra menolak untuk bergabung dengan ISIS. Penolakan untuk bergabung bersama ISIS untuk mendirikan negara Islam Irak dan Suriah juga dinyatakan oleh Aiman Az-Zawahiri sebagai pemimpin jaringan Al-Qaeda Internasional.

Penolakan Zawahiri untuk bergabung bersama ISIS segera diikuti oleh para pemimpin Al-Qaeda di berbagai negara. Bahkan para tokoh Al-Qaeda ini mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan ISIS terlampau kejam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berdasarkan fakta bahwa ISIS dikenal dengan kegiatan mereka yang sangat ekstrim terhadap orang-orang Islam di luar kelompoknya. Dalam aksinya, mereka sanggup melakukan kekerasan yang sangat keji terhadap rakyat sipil dan pasukan mujahidin lain, baik itu di Irak maupun di Suriah, baik Sunni maupun Syiah.

Menurut laporan PBB, tercatat sepanjang tahun 2014 sedikitnya sekitar 76.000 orang tewas di Suriah dan sekitar 15.000 orang tewas di Irak.² Sebagian besar korban tewas merupakan akibat dari kekerasan terkait ISIS di Suriah dan Irak. Kekerasan tersebut diantaranya adalah serangan udara Amerika Serikat atas ISIS, pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak di Suriah, serta kekerasan-kekerasan sektarian di Irak.³

Perlu diketahui, bahwa aksi kejam ISIS ternyata tidak hanya dilakukan kepada musuh-musuh mereka saja, tetapi juga dilakukan terhadap anggotanya sendiri. Sebagai gambaran aksi kejam ISIS, pada 20 Desember 2014 yang lalu, ISIS mengeksekusi mati 100 orang anggotanya di Raqqa, Suriah, dengan tuduhan hendak melarikan diri karena mencoba menghindari pertempuran. Selain itu, ISIS juga mengancam untuk membunuh anggotanya yang merokok, mereka beralasan bahwa merokok adalah kegiatan yang tidak ada gunanya dan sama saja dengan melakukan aksi bunuh diri secara perlahan-lahan.⁴

Gambaran mengenai organisasi teroris paling kontroversial didunia juga dibuktikan oleh ISIS lewat penggunaan propaganda media masa yang efektif. Pada tahun 2014, ISIS mendirikan *Al Hayat Media Center* dan *Ajnad Media Foundation* sebagai pusat media informasi untuk menyebarkan ideologi mereka. Media-media tersebut tidak hanya menggunakan bahasa arab sebagai pengantar

² Adrianus Mandey, *Jumlah korban tewas di Suriah sepanjang tahun 2014*, diakses dari Viva.co.id : <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/573975-76-000-jiwa-tewas-di-suriah-sepanjang-2014> pada tanggal 20 Februari 2015

³ *ibid*

⁴ Victor Maulana, *Gara-gara rokok ISIS eksekusi anggotanya*, diakses dari Sindonews : <http://international.sindonews.com/read/964654/43/gara-gara-rokok-isis-eksekusi-anggotanya-1423987095> pada 27 Februari 2015.

materi, tetapi juga menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Rusia, dan Perancis.⁵ Selain itu ISIS juga aktif melakukan propaganda lewat media sosial. Salah satunya adalah twitter, meskipun akun mereka secara teratur ditutup oleh administrator twitter, mereka sering membuat kembali dan mempertahankan eksistensinya di ranah online tersebut. Kelompok ini juga telah berusaha untuk merambah ke cabang situs media sosial alternatif lain, seperti Quitter, Friendica dan Diaspora.⁶

Propaganda melalui media informasi mungkin dapat dilakukan juga oleh organisasi lain, namun ISIS memiliki cara yang lebih efektif sekaligus kontroversial, yaitu dengan cara penyebarluasan video eksekusi mati para sandernya. Berbagai macam video eksekusi tersebut secara terang benderang telah membuka mata dunia internasional tentang kekejaman ISIS. Dimulai dari video eksekusi mati dua wartawan Amerika Serikat, James Foley dan Steven Sotlof. Pada 19 Agustus 2014, diunggah sebuah video yang memperlihatkan pemenggalan kepala James Foley oleh seorang militan ISIS. Sedangkan video kedua memperlihatkan pemenggalan kepala Steven Sotlof yang diunggah ke internet pada 2 September 2014. Dalam video tersebut, Sotlof memberikan kata-kata terakhir, bahwa pemenggalan dirinya merupakan balasan terhadap serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat.⁷

Video propaganda eksekusi mati ISIS tidak hanya berhenti sampai pada warga negara Amerika Serikat saja. Pada pertengahan September 2014, ISIS

⁵ Alex Roseberg, "New Al Qaeda Group Produces Recruitment Material for Americans, diakses dari Freebeacon: <http://freebeacon.com/national-security/new-al-qaeda-group-produces-recruitment-material-for-americans-westerners> pada 27 Februari 2015.

⁶ *ibid*

⁷ Imelda Syarif, *Satu lagi wartawan Amerika dibunuh ISIS* diakses dari Kompas.com, : <http://internasional.kompas.com> pada 20 Februari 2015.

kembali meluncurkan video yang menunjukkan pemenggalan seorang pekerja sosial asal Inggris bernama David Haines. Video yang diberi judul “*A Message to the Allies of America* (Pesan untuk Sekutu Amerika)” video tersebut memperlihatkan seorang eksekutor ISIS yang menjelaskan bahwa aksi tersebut adalah balasan karena Inggris bekerjasama dengan pemerintah Irak dan pasukan Kurdistan untuk memerangi ISIS.⁸

Video propaganda ISIS lainnya untuk menantang dunia internasional antara lain adalah video eksekusi mati dua orang sandera asal Jepang bernama Haruna Yukawa dan Kenji Goto serta seorang pilot asal Yordania bernama Moaz al-Kasaesbeh. Video eksekusi dua warga negara Jepang tersebut diunggah ke internet pada akhir Januari 2015. Eksekusi ini dilakukan dikarenakan pemerintah Jepang tidak memenuhi tuntutan ISIS yang meminta tebusan senilai \$200 juta dollar untuk kedua sandera tersebut. Dalam waktu yang berdekatan ISIS juga memperlihatkan video pembunuhan pilot Yordania Moaz al-Kasaesbeh dengan cara dibakar hidup-hidup didalam sebuah kandang. Pembunuhan Moaz dilatar belakangi karena pemerintah Yordania tidak memenuhi tuntutan ISIS untuk menukar Moaz dengan Sajida al-Rishawi, seorang perempuan militan ISIS yang ditahan pemerintah Yordania sejak tahun 2005 karena melakukan percobaan bom bunuh diri.⁹

Aksi-aksi propaganda ISIS yang dinilai kejam dan brutal tersebut akhirnya sukses menaikkan suhu konflik dunia internasional. Berbagai negara mulai

⁸ *Ibid*

⁹ Aris Jatmika, *Tuntutannya Tak Dipenuhi, ISIS Bunuh Pilot Yordania*, diakses dari Tempo: <http://www.tempo.co/read/news/2015/01/30/115638664/Tuntutannya-Tak-Dipenuhi-ISIS-Bunuh-Pilot-Yordania> pada 5 Maret 2015.

bereaksi terhadap kegiatan terorisme yang dilakukan ISIS. Mulai dari Amerika Serikat bersama NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang didukung penuh oleh 28 negara anggotanya, 10 negara Arab antara lain Mesir, Kuwait, Irak, Oman, Yordania, Qatar, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirates Arab selain itu Israel, Australia, China, Jepang, dan Iran juga mendukung perang terhadap ISIS.¹⁰

Salah satu negara yang paling getol menyatakan perang terhadap ISIS adalah Amerika Serikat. Komitmen Amerika Serikat dalam memerangi terorisme hingga ke akar-akarnya memang tidak diragukan lagi. Penabrakan pesawat ke gedung *World Trade Center* (WTC) dan gedung pusat kemiliteran Pentagon pada 11 September 2001 telah membawa dampak yang sangat besar terhadap percaturan politik internasional Amerika Serikat. Peristiwa tersebut merupakan pukulan telak bagi supremasi adidaya Amerika yang menuntut “perang terhadap terorisme”, yang menegaskan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang berdiri diposisi paling depan dan sangat berkomitmen untuk memberantas aksi terorisme didunia.

“Perang melawan terorisme” atau “*War on Terror*” yang dimotori oleh pemerintahan George W. Bush pada gilirannya menjadi arus utama dalam konstelasi hubungan internasional. Posisi Amerika Serikat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB berhasil mendorong keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 tanggal 12 September 2001 dan No. 1373 tanggal 28 September 2001. Resolusi Dewan Keamanan PBB itu kemudian diikuti oleh

¹⁰ Methew Cook, *NATO China Israel dan 10 Negara Arab Dukung AS Perangi ISIS*, diakses dari National Geographic: <http://www.nationalgeographic.co.id/dunia/1973-NATO-china-israel-dan-10-negara-arab-dukung-as-perangi-isis> pada 24 Maret 2015.

beberapa resolusi lainnya yang memerinci program aksi melawan terorisme internasional, serta memasukkan sejumlah organisasi sebagai jaringan organisasi teroris internasional.¹¹

Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi korban sasaran tindakan teror 11 September 2001 bereaksi sangat hebat atas tragedi itu. Pada 27 September 2001, Pemerintahan George W. Bush mendapat dukungan Senat Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer melawan Al-Qaeda dan Pemerintah Taliban di Afghanistan saat itu yang diduga kuat melindungi kegiatan jaringan Al-Qaeda pimpinan Osamah bin Laden, pelaku serangan 11 September 2001 dan aksi teror lainnya terhadap instalasi milik Amerika Serikat di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika. Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Bush terhadap Rejim Saddam Hussein di Irak pada bulan Maret 2003, selain karena Pemerintah Saddam Hussein tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, juga karena pemerintahan Saddam dianggap memiliki jaringan dengan Osama bin Laden dan melindunginya di Irak.

Dari beberapa fakta tentang reaksi Amerika Serikat terhadap aksi terorisme tersebut, cukup kuat menunjukkan bahwa mereka sangat bersungguh-sungguh untuk memberantas terorisme. Sehingga seruan perang Amerika Serikat terhadap ISIS dengan penggunaan kekuatan militer menjadi tidak mengherankan, terlebih ISIS merupakan “anak kandung al-Qaeda” yang merupakan musuh utama Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme pasca tragedi 11 September 2001.

¹¹ United Nation, Security Council “SC No. 1368” Diakses dari UN : <http://www.un.org/Docs/sc/committees3/73> pada tanggal 13 Maret 2015

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, terkait dengan keberadaan ISIS sebagai organisasi teroris dunia serta komitmen Amerika Serikat terkait “*War on Terror*” dalam menjalankan kebijakan luar negerinya maka rumusan masalah yang didapat dalam skripsi ini adalah :
“Bagaimana kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam memerangi aksi terorisme Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)?”

C. Kerangka Konsep

Konsep adalah rancangan ide, penggambaran hal atau benda ataupun gejala sosial yang dirangkum atau dinyatakan dalam istilah atau kata. Dalam hal ini konsep yang relevan sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penyusunan penulisan, agar penelitian dan pembahasan dalam penulisan dapat tersusun secara ilmiah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa konsep. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan *konsep kerjasama internasional dan konsep intervensi militer*.

1. Konsep Kerjasama Internasional

Menurut K.J Holsti kerjasama internasional merupakan proses kerjasama atau kolaborasi yang terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa

usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak.¹²

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:¹³

1. Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Pada dasarnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai

¹² *ibid*

¹³ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 152-153

satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

2. Konsep Intervensi Militer

Intervensi secara sederhana diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).¹⁴ Istilah intervensi dalam dunia politik berarti suatu keadaan dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Umumnya pelaksanaan intervensi militer ke suatu negara menggunakan alasan kemanusiaan, yang sering dikenal dengan istilah intervensi humanitarian. Intervensi humanitarian menurut J. L. Holzgrefe dalam bukunya “Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas” merupakan tindakan yang melegalkan penggunaan senjata dan kekerasan militer untuk mencegah pelanggaran HAM yang lebih parah, bahkan melegalkan menyerang suatu negara tertentu tanpa melihat prinsip-prinsip kedaulatan atau:

*“it is the threat or use of force across state borders by a state (or group of state) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force is applied.”*¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu negara di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar, intervensi militer dapat dilakukan. Dalam

¹⁴Intervensi. Diakses dari <http://www.artikata.com/arti-330953-intervensi.html>. tanggal 14 April 2012.

¹⁵ Holzgrefe, J. L. and Keohane, Robert O. (2003). *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, hal. 18.

kasus dimana pemerintah yang melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya, maka hak-hak kedaulatan negara tersebut tidak perlu lagi dihargai. Negara atau komunitas internasional dapat mengambil langkah untuk melakukan intervensi dengan otorisasi dari organisasi atau komunitas yang berhak untuk memberikan otorisasi.

Sedangkan intervensi menurut K.J Holsti, yaitu tindakan radikal dengan ikut campur tangan dalam urusan negara lain. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan beragam aspek antara lain campur tangan diplomatik, memamerkan kekuatan, pemberontakan atau subversi perang gerilya serta penggunaan kekuatan militer. Campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat adalah norma dasar dari hukum internasional. Intervensi mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negara lain yang berdaulat.¹⁶

D. Hipotesa

Memperhatikan uraian latar belakang masalah serta rumusan pertanyaan yang ada dan menitik beratkan pada landasan teori sebagai sebuah alat bantu analisa terkait kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam memerangi aksi terorisme *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS), maka penulis memberikan sebuah hipotesis sebagai berikut : *Amerika Serikat menggunakan dua cara dalam memerangi aksi terorisme ISIS. Pertama, melalui kerjasama internasional. Amerika Serikat yang meyakini bahwa war on terror tidak akan pernah berjalan mudah membentuk koalisi internasional anti ISIS untuk*

¹⁶ KJ Holsti, 1995, 7th Edition *International Politics : A Framework for Analysis*. New Jersey : Prentice Hall Inc.

memerangi ISIS secara global. Kedua, menggunakan intervensi militer untuk menghancurkan ISIS di Irak dan Suriah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat karena menganggap bahwa penggunaan kekuatan militer adalah cara paling efektif untuk menghancurkan ISIS.

E. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat. Dengan demikian, pembahasan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan menjadi kurang fokus, rancu dan kurang ilmiah. Untuk itu jangkauan penulisan dalam karya ilmiah ini dibatasi pada topik yang diangkat oleh penulis pada awal deklarasi *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) yaitu tanggal 9 April 2013 hingga pada terselesaikannya penulisan skripsi ini.

F. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai politik luar negeri Amerika Serikat dalam memerangi aksi terorisme *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS). Ada dua poin utama yang penulis soroti dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat kali ini. *Pertama*, memberikan gambaran yang jelas mengenai keberadaan ISIS sebagai organisasi teroris dunia. *Kedua*, memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap aksi terorisme ISIS.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini lebih mentik beratkan pada studi kepustakaan yang diharapkan mendapatkan data dan juga fakta yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang penulis gunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang fokus pada kajian politik luar negeri Amerika Serikat, terorisme dan studi keamanan global. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui informasi yang dimuat dalam surat kabar, artikel ilmiah, situs internet, serta sumber-sumber data sekunder lain yang dirasa valid untuk penulis gunakan sebagai data pendukung penyusunan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Pada Bab Ke-I, penulis mengisi dengan bagian pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab Ke-II, penulis mengisi dengan bagian pembahasan. Deskripsi *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) sebagai sebuah organisasi teroris dunia. Pembahasan terhadap ISIS meliputi latar belakang pembentukan ISIS, aliran

ideologi dan tujuan ISIS, struktur organisasi ISIS, kekuatan finansial dan kekuatan militer ISIS, serta sepak terjang ISIS dalam melakukan aksi terror.

Pada Bab Ke-III, penulis mengisi bagian ini dengan pembahasan tentang sikap politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi aksi terorisme ISIS. Pada bab ini akan dijelaskan upaya konfrontasi Amerika Serikat dan koalisi internasional anti ISIS untuk mendegradasi kekuatan ISIS.

Terakhir pada Bab Ke-IV, merupakan penutup dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Serta dilanjutkan dengan penyusunan daftar pustaka dan lampiran dimana bagian ini berisi data buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan.